

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Pada penulisan skripsi ini, penulis mencoba mengkaji lebih dalam terhadap masalah Internasional dan diplomasi yang cenderung meningkat. Hal ini adalah wajar karena dalam suatu sistem politik yang terbuka dan luas, masalah-masalah dalam dalam negeri atau luar negeri masyarakat juga ikut andil dalam menentukan sistem politik jadi tidak hanya di lakukan oleh elit politik saja.

Misalnya saja dalam melakukan hubungan dengan negara lain digunakan cara diplomasi. Dalam praktek hubungan internasional, diplomasi dipakai dengan penerapan metode negosiasi persuasi, tukar pikiran, dan sebagainya, sehingga mengurangi kemungkinan penggunaan kekuatan (militer) yang sering tersembunyi di balik hubungan antar negara, jadi diplomasi adalah salah satu upaya menjalin hubungan Internasional dengan jalan damai terutama untuk mencapai kepentingan nasional negaranya.

Ada beberapa bentuk diplomasi yang dapat dilakukan suatu negara, salah satunya adalah bentuk diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan ini dianggap efektif dalam mencapai tujuan karena pelaksanaannya dilakukan dengan jalan damai tanpa paksaan. Banyak negara didunia melakukan

... melalui ...

festival kesenian di negara lain, pertukaran ahli, event olahraga berskala internasional, dan lain-lain.

Adapun cara efektif yang paling dekat dengan politik yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan diplomasi kebudayaan ini adalah dengan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi yang biasanya dilakukan para pejabat pemerintah antar negara yang kadang-kadang juga dihadiri oleh masyarakat umum.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 ASEAN yang diselenggarakan di Bali Internasional Convention Center (BICC) di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 7-8 Oktober 2003. Sebanyak 14 Kepala Negara anggota Asean dan Cina, Korea Selatan, Jepang, serta India, berkumpul membahas perkembangan hubungan bilateral kerjasama antar negara disamping mengevaluasi hasil kerjasama yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Penyelenggaraan KTT ke-9 ASEAN ini merupakan yang kedua kalinya di Bali. Sebelumnya, KTT pertama ASEAN juga diselenggarakan di Pulau Dewata, tepatnya 24 Februari 1976.

Namun untuk penyelenggaraan KTT ASEAN ini, Bali bahkan Indonesia memiliki nuansa dan kepentingan khusus. Nuansa khususnya adalah ditengah ketegangan masyarakat dunia terhadap ancaman terorisme. Terlebih lagi tepat 12 Oktober 2002 setahun sebelum diadakannya KTT ini, Bali dilanda guncangan bom yang terjadi di kawasan Legian-Kuta-Bali.

Oleh karena itu penggunaan event KTT ke-9 ASEAN ini sebagai

kepentingan-kepentingan nasional yang ingin dicapai, serta penggunaan event KTT ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Dari penjelasan diatas, penulis ingin mengambil judul skripsi mengenai “Konferensi Tingkat Tinggi ke-9 ASEAN Dalam Perspektif Diplomasi Kebudayaan”.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat memberikan gambaran tentang wawasan dalam diplomasi kebudayaan serta kepentingan nasional Indonesia yang ingin dicapai sehubungan dengan diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9.
2. Untuk memenuhi syarat formal dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1.3 Latar Belakang Masalah

Sejak krisis finansial yang melanda kawasan Asia, khususnya bagi Indonesia, roda perekonomian Indonesia sempat terhenti, sehingga kondisi tersebut menyebabkan terhambatnya aktifitas sektor-sektor perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut juga berdampak buruk pada sektor lainnya,

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 yang lalu, kemudian digantikan oleh pemerintah Era Reformasi, hingga saat ini, pada kenyataannya pemerintah Indonesia belum mampu menciptakan stabilitas perekonomian maupun kondisi politik yang lebih kondusif. Memang hal tersebut merupakan tugas yang amat berat bagi pemerintah Indonesia.

Di tengah Indonesia sedang berbenah untuk menciptakan kembali stabilitas ekonomi dan politik yang lebih kondusif, Indonesia dihadapkan dengan tantangan-tantangan baru akibat perkembangan dunia yang terus mengglobal, dan ancaman terorisme yang terus menerus menimpa bangsa kita.

Di lain pihak untuk tetap dapat menjaga kelangsungan hidup bangsa Indonesia di dalam hubungan Internasional, negara Indonesia diharapkan tetap dapat menjaga hubungan bilateral dan multilateral yang baik agar tetap terjaganya stabilitas keamanan kawasan dan dunia Internasional dan hubungan tersebut berguna dalam memperlancar berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia internasional terutama kegiatan perekonomian dan perdagangan antar bangsa.

Di dalam menjaga hubungan bertetangga baik dengan negara di satu kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi anggota dari ASEAN dimana Indonesia juga termasuk salah satu pendiri organisasi ASEAN yang dibentuk di Bangkok, Thailand, 8 Agustus 1967.¹

¹ James Luhulima, *Asia Tenggara dan Negara Luar Kawasan yang Mempengaruhinya*:
1960-1965

Pada tanggal 7-8 Oktober 2003 lalu di Nusa Dua, Bali telah berlangsung Pertemuan Puncak Para Kepala Negara ASEAN atau KTT ASEAN ke-9, berakhir dengan ditandatanganinya deklarasi Bali Concord II.

Deklarasi ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Bali Concord I, dimana KTT ASEAN pertama tentang Bali Concord juga diadakan di Pulau Dewata tepatnya tanggal 24 Februari 1976, yang memfokuskan pada pembentukan komunitas politik dan keamanan, komunitas ekonomi dan komunitas sosial budaya yang saling terkait satu sama lainnya untuk memperkuat upaya mencapai perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan.²

Pada KTT ASEAN tahun 1976, ASEAN menerima Bali Concord sebagai wujud kesepakatan kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN. Kerja sama tersebut meliputi aspek politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan lainnya. Kerja sama demikian, terutama dalam bidang keamanan dan politik, adalah sesuatu yang imperatif karena munculnya masalah-masalah besar seperti terorisme internasional.³

Setelah berlangsungnya KTT di Bali, susunan organisasi ASEAN mengalami perubahan dari susunan struktur organisasi ASEAN sebelum diadakan KTT di Bali 1976 yang terdiri dari : Sidang Tahunan Para Menteri, Standing Committee, Komite-komite Tetap dan Khusus, Sekretariat Nasional ASEAN pada setiap ibukota negara-negara anggota, struktur ini berubah

² Faustinus Andrea, "Diplomasi Tingkat Tinggi Asia Pasifik: KTT ASEAN dan KTT APEC

menjadi susunan struktur sebagai berikut : Pertemuan Para Kepala Pemerintahan (Summit Meeting) yang merupakan kekuasaan tertinggi, Sidang Tahunan para Menteri Luar Negeri ASEAN (Annual Ministerial Meeting), Sidang para Menteri Ekonomi setiap 2 tahun sekali, Sidang para Menteri lainnya (Non-Ekonomi), Standing Committee, Komite-Komite lainnya.

KTT ASEAN ini sendiri merupakan bagian dari berbagai macam agenda ASEAN. Di mana dalam setiap KTT yang diselenggarakan oleh masing-masing anggota ASEAN biasanya menghasilkan paling sedikitnya satu deklarasi. Dari deklarasi yang dihasilkan dari setiap pertemuan atau KTT, kemudian akan dijadikan sebagai jadwal program kerja sampai kemudian dihasilkan lagi semacam deklarasi yaitu dokumen lainnya.

Tahun 2003 KTT ke-9 ASEAN diselenggarakan di Bali. Mengingat Bali pada bulan Oktober tiga tahun yang lalu mengalami peristiwa pemboman tepatnya 12 Oktober 2002 dimana korbannya banyak berasal dari pihak Australia maka image kondisi keamanan di Indonesia semakin jatuh dimata dunia internasional.

Akibat tragedi itu, maka pihak pemerintah Indonesia memiliki kepentingan khusus terhadap penyelenggaraan KTT ASEAN ke-9. Tak mengherankan bila pengamanan kali ini lebih dari biasanya, pengamanan dilakukan dengan ekstra ketat, hampir tiap pintu masuk ke wilayah Bali serta titik rawan dijaga oleh petugas keamanan.⁴

⁴*Ibid*, hal 384

Hal ini dilakukan agar para Kepala Negara yang menghadiri KTT ASEAN ke-9 beserta para pengusaha ASEAN dapat berkonsentrasi penuh, tanpa perlu merasa khawatir akan adanya ancaman gangguan bom lainnya.

Indonesia terlebih lagi Bali harus dapat mengambil manfaat sebesar-sebesarnya dari penyelenggaraan KTT ini. Karena bermanfaat bagi upaya pemulihan citra yang sekarang mulai dibangun lagi oleh pemerintah daerah Bali dan pemerintah Indonesia khususnya citra pariwisata (keamanan) dan ekspor untuk perbaikan ekonomi secara keseluruhan.⁵

KTT ASEAN ke-9 yang dihadiri oleh Megawati Soekarnoputri selaku Presiden RI pada masa itu, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, PM Thailand Thaksin Shinawatra, PM Malaysia Mahathir Mohamad, PM Singapura Goh Chok Tong, Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo, PM Vietnam Phan Van Khai, PM Laos Bounhang Vorachith, PM Kamboja Hun Sen dan PM Myanmar Khin Nyunt.⁶ Kehadiran para Kepala Pemerintahan ASEAN dan Kepala Negara Cina, Korea Selatan, Jepang, dan India ditambah para pengusaha ASEAN menjadi point tersendiri dalam menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai aman kembali.

Namun sayangnya, berbagai rangkaian kegiatan KTT ASEAN itu masih terkesan eksklusif karena sangat sedikit melibatkan pengusaha lokal Bali. Bahkan, beberapa pelaku bisnis di daerah ini mengaku tidak tahu persis akan kegiatan ini kalau saja tidak membaca koran atau nonton TV, yang

⁵ <http://www.balipost.co.id/Balipostcetak/2003/9/5/118.htm>, didownload tanggal 4 Oktober 2003

⁶ Faustinus Andrea, *Op cit.*, hal 385

menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial diantara pengusaha.⁷ Demikian pula halnya dengan stabilitas politik Internasional yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di Indonesia.

Adanya tragedi WTC, 11 September 2001, serta dampak tragedi bom Bali 12 Oktober 2002 yang ditambah dengan adanya krisis moneter yang berkepanjangan memerlukan penanganan serius. Dalam hal ini harus dapat direspon dengan cepat oleh pemerintahan Megawati untuk berani melakukan tindakan yang dapat berguna dalam memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia.

Termasuk dalam hal penanganan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-9, pemerintah Indonesia beserta pihak keamanan dan pihak yang terkait lainnya harus dapat membuat Kepala Pemerintahan ASEAN, Cina, Korea Selatan, Jepang, India, dan peserta KTT lainnya dan pengusaha ASEAN merasa aman dan nyaman dalam mengikuti KTT ini.

Dengan begitu secara tidak langsung Indonesia bisa menunjukkan pada dunia internasional bahwa kita tetap aman untuk dikunjungi oleh wisatawan mancanegara walaupun dalam kondisi yang meprihatinkan ini setelah terjadi tragedi bom Bali kita tetap berusaha bangkit untuk memperbaiki ekonomi, sosial, politik dan bidang pariwisata.

Dengan adanya kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang menunjukkan ketidakstabilan ini, penyelenggaraan KTT ASEAN ke-9 2003 menjadi sebuah fenomena, dengan melihat kemerosotan ekonomi yang

⁷ <http://www.kalimast.co.id/Balimastatal/2003/10/13/19.htm> didownload tanggal 4 Oktober 2003

dialami Indonesia, apakah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-9 dapat berjalan lancar karena KTT ini membutuhkan dukungan dan dana yang besar serta apakah kepentingan dibalik penyelenggaraan KTT ASEAN ke-9 ini dapat terwujud.

1.4 Rumusan Masalah

Mengapa Pemerintah Republik Indonesia berani menyelenggarakan KTT ASEAN ke-9 2003 di Bali ?

1.5 Landasan Teori

Konsep digunakan untuk mengorganisasi dan mengidentifikasi fenomena yang menarik perhatian. Untuk dapat memahami dan menganalisa permasalahan diatas kita memerlukan kerangka pemikiran. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan adalah konsep Kepentingan Nasional dan konsep Diplomasi Kebudayaan.

Konsep Kepentingan Nasional ini digunakan untuk dapat mengetahui orientasi Politik Luar Negeri Indonesia yang diformulasikan dalam Kepentingan Nasionalnya. Sedangkan konsep Diplomasi Kebudayaan digunakan untuk mengetahui bagaimana efektivitas sebuah event dalam mengangkat dan mempromosikan Indonesia di mata dunia internasional. Kedua kerangka pemikiran ini diharapkan dapat menjelaskan dan menggambarkan seberapa besar kepentingan nasional Indonesia di dalam KTT ASEAN ke-9.

I. Konsep Kepentingan Nasional

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri - kepentingan nasional merupakan konsepsi umum, tapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan konsepsi umum, tapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.⁸

Untuk mencapai tujuan nasional, perlu dipertimbangkan juga kekuatan nasional yang dimiliki. Adapun elemen-elemen dari kepentingan nasional, menurut Roy Olton dan Jack C. Plano, mencakup pertahanan diri (*self preservation*), kemandirian (*independence*), integritas teritorial (*territorial integrity*), keamanan militer (*military security*), dan kemakmuran ekonomi (*economic wellbeing*).⁹

Dalam kaitannya dengan konsep kepentingan nasional seorang ilmuwan yang sudah tak asing lagi dalam studi ilmu hubungan internasional yaitu Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa esensi dari politik luar negeri adalah kepentingan nasional.¹⁰ Maksudnya adalah bahwa politik luar negeri suatu negara di dasarkan kepada kepentingan politik domestik, atau dengan

⁸ Jack C. Plano, Roy Olton, *The Internasional Dictionary*, terj. Wawan Juanda, Third Edition, Clío Press Ltd. England, 1982, hal.7

⁹ *Ibid*, hal 217

¹⁰ Ditet III tidak diterbitkan. Faisal

kata lain politik luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri yang diformulasikan dalam kepentingan nasional negara tersebut.

Kepentingan nasional ini diartikan sebagai kelangsungan hidup (*survive*) yang meliputi kemampuan untuk melindungi identitas fisik, mempertahankan rezim ekonomi politiknya dan memelihara identitas kulturalnya.¹¹ Berkaitan dengan itu Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional dalam bukunya *Politic Among Nation* sebagai “*Penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga kepentingan yang paling vital bagi kelestarian negara bangsa*”.¹² Kekuasaan tidak akan tercapai tanpa adanya kekuatan nasional. Seperti kita ketahui ada dua pokok kekuatan nasional yaitu tangible dan intangible. Politik suatu negara tidak bisa lepas dari suatu kepentingan nasional, karena tujuan politik adalah untuk mempertahankan kepentingan nasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas ditegaskan bahwa tujuan perumusan politik luar negeri Indonesia yang berorientasi pada kepentingan nasional diarahkan pada upaya mempercepat pemulihan perekonomian nasional, meningkatkan kerjasama diantara negara-negara sahabat, dan sekaligus mengupayakan pulihnya kepercayaan internasional terhadap tekad dan kemampuan Pemerintahan baru untuk mengatasi krisis multidimensional yang sedang dihadapi saat ini.¹³

¹¹ *Ibid*, hal. 15

¹² Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal 18

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir ini upaya yang ditempuh Indonesia dalam pemulihan citra Indonesia dilakukan dengan jalur diplomasi dengan memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.¹⁴

a. Upaya Pemulihan Citra Indonesia

Masalah terorisme yang dihadapi Indonesia yaitu sedang maraknya terjadi aksi pemboman, dan yang paling parah pada tahun 2002 adalah peristiwa Bom Bali, di mana daerah Bali merupakan kawasan wisata internasional. Setelah terjadinya peristiwa bom Bali maka perekonomian nasional semakin menurun drastis padahal sebelumnya Indonesia sedang berusaha bangkit dari keterpurukan akibat krisis moneter tahun 1997, nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar menurun sehingga harga barang elektronik semakin tinggi, kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia semakin berkurang jumlahnya.

Akibatnya citra baik Indonesia jatuh di mata dunia internasional, stabilitas keamanan Indonesia dianggap sudah menurun sehingga Indonesia tidak aman lagi untuk dikunjungi. Hal ini tentu saja dipengaruhi sistem politik Indonesia.

Penyelenggaraan KTT ke-9 ASEAN 2003 merupakan salah satu peluang positif yang besar manfaatnya dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk membantu memulihkan citra Indonesia, sekaligus juga merupakan upaya Indonesia untuk memperlihatkan kemampuan negara

¹⁴ *Ibid*, hal 11

kita dalam memaksimalkan kekuatan nasional di bidang keamanan dalam hal keamanan pelaksanaan KTT ini.

Penyelenggaraan KTT ke-9 ASEAN ini yang dihadiri oleh Kepala negara ASEAN dan negara Asia lainnya mendapat banyak perhatian dari kalangan media pers termasuk didalamnya pers internasional yang secara tidak langsung dapat digunakan sebagai media untuk mempromosikan Indonesia kepada dunia internasional bahwa dengan penyelenggaraan KTT yang berjalan lancar ini menunjukkan bahwa Indonesia telah aman.

b. Manfaatnya bagi Perekonomian Indonesia

Dengan penyelenggaraan KTT ke-9 ASEAN tahun 2003 maka tujuan kepentingan nasional Indonesia dalam upayanya memulihkan perekonomian Indonesia dapat dicapai. Para pengusaha Indonesia terutama yang bermukim di wilayah Bali dapat memanfaatkan moment KTT ini untuk memudahkan akses dalam perdagangan antar negara dan ekspor karena di dalam agenda KTT ini terdapat salah satu kegiatan yaitu ASEAN Business and Investment Summit (ASEAN-BIS, 5-7 Oktober) dalam kegiatan KTT Bisnis dan Investasi ASEAN beberapa acara bisnis juga digelar. Mulai dari pertemuan pengusaha kargo internasional, pameran furniture dan handicraft internasional.¹⁵

ASEAN-BIS yang dihadiri sekitar 800 pengusaha ASEAN ini mempunyai arti penting karena konferensi ini selain sebagai momentum sosialisasi segala peraturan liberalisasi perdagangan dan investasi ASEAN kepada kalangan businessman, juga sebagai kesempatan merumuskan

Dampak dari event ini pariwisata Bali akan pulih sehingga banyak wisatawan datang selanjutnya mereka diharapkan berbelanja di sini, sehingga ekspor Bali akan meningkat. Selain itu adanya KTT ke-9 ASEAN ini akan menambah jumlah devisa kita.

2. Konsep Diplomasi Kebudayaan

Penelitian ini menggunakan konsep Diplomasi Kebudayaan sebagai kerangka konseptualnya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai satu sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar.¹⁸

Sedangkan arti Diplomasi menurut K. M. Panikkar dalam bukunya *The Principle and Practice of Diplomacy* menyatakan bahwa diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara.¹⁹

Secara makro, Diplomasi Kebudayaan adalah usaha-usaha suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan termasuk didalamnya adalah pemanfaatan bidang-bidang ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer, sosial kesenian dan lain-lain, dalam percaturan masyarakat internasional. Dari segi pola komunikasi yang seperti itu dapat dikemukakan beberapa jenis diplomasi kebudayaan menurut tujuan, bentuk, dan sarannya.²⁰

¹⁸ Kuntjoroningrat, *Pengantar Antropologi Budaya*, Aksara Baru, Jakarta 1979, hal 193

¹⁹ S. L. Roy, *Diplomasi*, terjemahan Harwanto dan Mirsawati, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 6

²⁰ Tulus Warsito, *Diplomasi Kebudayaan : Dalam Strategi Politik Luar Negeri Negara-Negara Sedang Berkembang*, FISIPOL, UMY, 1998, hal. 26

Tujuan utama dari Diplomasi Kebudayaan adalah untuk mempengaruhi pendapat umum (masyarakat negara lain) guna mendukung suatu kebijakan politik luar negeri tertentu. Pola umum yang biasanya terjadi dalam hubungan diplomasi ini adalah antara masyarakat (suatu negara tertentu) dengan masyarakat negara lain. Namun demikian pendapat umum yang dimaksud disini adalah guna mempengaruhi policy pemerintah dari masyarakat yang bersangkutan.²¹

Sasaran utama Diplomasi Kebudayaan adalah pendapat umum, baik pada level nasional (dari suatu masyarakat negara-bangsa tertentu) maupun internasional, dengan harapan pendapat umum tersebut dapat mempengaruhi para pengambil keputusan pada pemerintah atau organisasi internasional.

Sarana Diplomasi Kebudayaan adalah segala macam alat komunikasi, baik media elektronik maupun cetak, yang dianggap dapat menyampaikan isi atau misi politik luar negeri tertentu, termasuk didalamnya sarana diplomatik maupun militer.

Materi ataupun isi Diplomasi Kebudayaan adalah segala hal yang secara makro atau mikro dianggap sebagai pendayagunaan aspek budaya (dalam politik luar negeri), antara lain : kesenian, pariwisata, olahraga, tradisi, teknologi, sampai dengan pertukaran ahli dan lain sebagainya.

Adapun bentuk-bentuk dari Diplomasi Kebudayaan terdiri dari 7 bentuk yaitu pertama *Eksibisi*; Eksibisi ini merupakan bentuk diplomasi

... .. bentuk-bentuk diplomasi modern adalah

diplomasi secara terbuka, artinya bahwa diplomasi modern secara konvensional menganut dasar yang eksibionistik dan transparan.

Kedua *Propaganda* ; propaganda sesungguhnya merupakan bentuk klasik atau cikal bakal dari Diplomasi Kebudayaan²², karena nilai-nilai ideologi suatu bangsa yang dianggap sebagai nilai kebudayaan menjadi bahan pokok untuk disampaikan kepada bangsa lain. Ketiga *Kompetisi*; didalamnya terlihat sistem nilai yang paling esensial dalam mengatur kekuatan nasional masing-masing negara yang bersangkutan dalam rangka mengungguli bangsa lain.

Keempat, *Penetrasi*; penetrasi dianggap sebagai salah satu bentuk diplomasi kebudayaan karena sasaran kegiatan tersebut adalah langsung kepada masyarakat bangsa lain. Subtansi dari misi kegiatan tersebut biasanya berupa memperkenalkan ataupun memaksakan nilai-nilai ekonomi, ideologi, ataupun sosial politik tertentu yang pada pengertian makro disebut sebagai kebudayaan.

Kelima, *Negosiasi*; Diplomasi Kebudayaan dalam bentuk negosiasi mencerminkan keinginan dari bangsa-bangsa yang bersangkutan untuk saling memperkenalkan, mengakui, menghormati, dan menghargai kebudayaan masing-masing bangsa tersebut, baik yang kemudian dilaksanakan dalam bentuk yang lebih khas, misalnya pertukaran kebudayaan atau pertukaran ahli, maupun bentuk kerjasama makro yang lain.

²² *Ibid*, hal 6

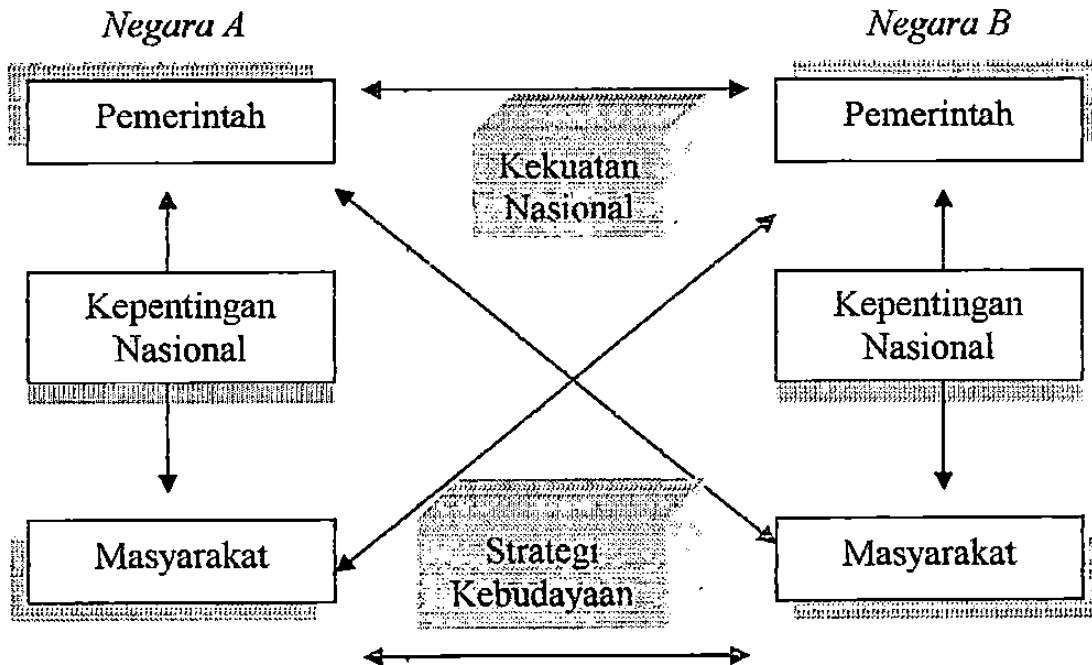
Keenam, *Pertukaran Ahli Studi*; Diplomasi Kebudayaan ini merupakan hasil negosiasi. Tetapi dalam bentuknya yang khas, pertukaran ahli mencakup masalah kerjasama pertukaran ahli dalam bidang tertentu. Dalam istilah yang lebih populer, Diplomasi Kebudayaan seperti ini sering juga disebut sebagai pelaksanaan alih teknologi. Hal ini memberikan gambaran bahwa negara-negara yang bersangkutan mempunyai kepentingan timbal balik dalam aspek kebudayaan pada umumnya.

Ketujuh, *Terorisme*; yang dimaksud dengan terorisme disini adalah setiap tindakan kekerasan yang dilancarkan oleh suatu bangsa kepada bangsa lain tanpa adanya deklarasi perang secara konvensional dengan tujuan utama pengakuan politik.

Pelaku atau aktor yang dapat melakukan kegiatan Diplomasi Kebudayaan adalah : pemerintah maupun non-pemerintah, individual maupun kolektif, atau setiap warganegara. Oleh karena itu, pola hubungan Diplomasi Kebudayaan antarbangsa bisa terjadi antara pemerintah-pemerintah, pemerintah-swasta, swasta-swasta, pribadi-pribadi, pemerintah-pribadi, dan seterusnya. Dalam kegiatan Diplomasi Kebudayaan yang dilakukan

Tabel 1

Pelaku dan Sasaran Diplomasi Kebudayaan



Sumber : Tulus Warsito, Diplomasi Kebudayaan : Dalam Strategi Politik Luar Negeri Negara-Negara Sedang Berkembang, FISIPOL, UMY, 1998 : 11.

Penjelasan Tabel 1 adalah Setiap Negara, dalam hal ini terdiri dari Pemerintahan dan Masyarakat, bahwa dalam rangka usaha memperjuangkan Kepentingan Nasionalnya harus selalu mengoptimalkan semua sumber daya nasional yang disebut dengan Kekuatan Nasional. Dalam memanfaatkan semua kekuatan nasional direkayasa dalam Strategi Kebudayaan.

Dari segi pola komunikasi yang seperti itu dapat dikemukakan

... Diplomasi Kebudayaan mempunyai tujuan, bentuk dan

Tabel II
Menjelaskan hubungan antara situasi, bentuk, tujuan dan sarana Diplomasi Kebudayaan

Situasi	Bentuk	Tujuan	Sarana
Damai	-Eksibisi -Kompetisi -Pertukaran Misi -Negoisasi -Konferensi	-Pengakuan -Hegemoni -Persahabatan -Penyesuaian	-Pariwisata -Olahraga -Pendidikan -Perdagangan -Kesenian
Krisis	-Propaganda -Petukaran Misi -Negoisasi	-Persuasi/bujukan -Penyesuaian -Pengakuan -Ancaman	-Politik -Mass Media -Diplomatik -Misi Tk. Tinggi -Opini Publik
Konflik	-Terror -Penetrasi -Pertukaran Misi -Boikot -Negoisasi	-Ancaman -Subversi -Persuasi -Pengakuan	-Opini Publik -Perdagangan -Para Militer -Forum Resmi Pihak Ketiga
Perang	-Kompetensi -Terror -Penetrasi -Propaganda -Embargo -Boikot -Blokade	-Dominasi -Hegemoni -Ancaman -Subversive -Pengakuan -Penaklukan	-Militer -Para Militer -Penyeludupan -Opini Publik -Perdagangan -Supply Barang Konsumtif (termasuk senjata)

Sumber : Tulus Warsito, *Diplomasi Kebudayaan : Dalam Strategi Politik Luar Negeri Negara-Negara Sedang Berkembang*, FISIPOL, UMY, 1998 : 22.

Keterangan :

- Semakin negatif hubungan antara dua (atau lebih) negara bangsa, maka

- Dalam pengertian umum/konvensional, Diplomasi Kebudayaan dikenal hanya pada waktu damai saja.

Penjelasan dari Tabel diatas adalah penerapan konsep Diplomasi Kebudayaan yang tepat digunakan dalam permasalahan ini adalah Negosiasi. Dimana dalam hal ini bentuk Negosiasi dilakukan dalam situasi Damai yang bertujuan untuk mendapatkan Pengakuan, Hegemoni, Persahabatan, dan juga kerja sama dengan negara lainnya.

Yang dimaksud sebagai negosiasi di sini bukanlah sekedar apa yang dirundingkan (dinegosiasikan), melainkan juga cara-cara pelaksanaan negosiasi. Dalam percaturan politik internasional, masalah 'tempat' dimana suatu negosiasi dilaksanakan, amat penting untuk dibahas sebelum negosiasi itu sendiri tersebut dilaksanakan.

Hal itu terjadi karena lingkungan budaya dari tempat yang bersangkutan mau tak mau akan mempengaruhi cara pengambilan keputusan dalam suatu negosiasi. Lingkungan budaya (cultural environment) dalam hal ini adalah : tingkat kesadaran politik masyarakat setempat, sistem pers/media masa, sistem keamanan dan pengamanan, maupun fasilitas-fasilitas akomodasi untuk melaksanakan negosiasi tersebut.

Adanya negosiasi, baik dalam arti teknis pelaksanaan maupun sebagai materi yang dinegosiasikan, mencerminkan adanya tingkat pengakuan internasional yang positif bagi tuan rumah. Itulah sebabnya banyak negara

1.6 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka dasar teoritik di atas, maka dapat ditarik hipotesa, bahwasanya dengan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia mendapat pengakuan kembali dari dunia internasional yang diharapkan dapat memulihkan citra positif Indonesia.

1.7 Metode Penelitian

Penulisan ini didasarkan pada analisa data sekunder, yaitu tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan literature seperti buku, majalah, jurnal, internet, Koran, dan penerbitan berkala lainnya sebagai sumber data.

1.8 Jangkauan Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini pada tahun 2002-2003.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok masalah, landasan teori, hipotesa, metode penulisan, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Dinamika Hubungan Indonesia dengan ASEAN, dalam bab ini membahas Arti penting ASEAN bagi Indonesia, Politik Luar Negeri

Bab III : Analisis Politik Luar Negeri Indonesia dengan ASEAN

Latar Belakang ASEAN dan Perkembangannya, Peluang dan Tantangan ASEAN, dan Perkembangan Program KTT ASEAN.

Bab III : Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-9, dalam bab ini dijelaskan tentang Aspek Teknis dari KTT ASEAN ke-9, Kondisi Indonesia Pra KTT ASEAN Ke-9, Hambatan Dalam Penyelenggaraan KTT ASEAN Ke-9, Indonesia sebagai Tuan Rumah KTT ASEAN ke-9, Agenda KTT ke-9 ASEAN, Pelaksanaan KTT ASEAN ke-9.

Bab IV : Diplomasi Kebudayaan sebagai upaya untuk mencapai Kepentingan Nasional Indonesia melalui KTT ASEAN ke-9, dalam bab ini penulis membahas tentang definisi Diplomasi Kebudayaan, Peran KTT ASEAN ke-9 sebagai fasilitator untuk mencapai Kepentingan Nasional. Peran pemerintah Indonesia dalam KTT